

Klarifikasi PT Jujur Kinario Projo Terkait Pengadaan Konsumsi Pelantikan dan Bimtek KPPS Sleman **Tak Pernah Sebut Snack Seharga Rp 2.500, Heran Dituduh Wanprestasi**

Kejaksaan Tinggi DIY telah selesai mengadakan penelusuran atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan konsumsi pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Kabupaten Sleman.

Hasilnya, kejaksaan belum menemukan indikasi terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan negara. Alasannya, belum ada uang negara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman. Dengan begitu tuduhan adanya dugaan penyuntangan anggaran sebagaimana selama ini beredar terpatalkan. "Kami tidak tahu dari mana sumbernya anggaran konsumsi pelantikan KPPS Rp 15.000, tapi penyajiannya Rp 2.500. Angka itu sumbernya bukan

berasal dari kami. Kami tidak tahu-menahu dengan angka Rp 2.500 tersebut," ucap Direktur Utama PT Jujur Kinario Projo (JKP) Ari Hadianto saat memberikan keterangan di kantornya, kemarin (12/2). Ari juga bertanya-tanya ketika mengetahui Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Baehaqi kepada sejumlah media menjelaskan telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak penyedia/ vendor karena dianggap telah

mengingkari perjanjian atau wanprestasi. Tuduhan sepihak itu membuatnya heran. Pertimbangannya, hingga pelaksanaan pelantikan anggota KPPS se-Sleman yang diselenggarakan pada Kamis (25/2), KPU Sleman belum menandatangani kontrak. "Bagaimana mungkin belum ada kontrak ada statemen kontrak diputus karena kami dituduh melakukan wanprestasi," tandas Ari. Direktur utama JKP ini menengarai pernyataan tersebut merupakan sebuah kebohongan. Sebab, antara pihaknya dengan KPU Sleman belum ada kontrak sama sekali. Dengan demikian, lanjut Ari, tidak ada kontrak yang diputus. Sebab, tidak ada kontrak sama sekali.

"Belum ada kontrak kok sudah bicara kontrak diputus. Dari mana dasarnya?," tanyanya dengan nada bingung. Soal jumlah snack juga berbeda. Data seperti rilis kedua KPU Sleman sebanyak 24.199 orang. Sedangkan data yang diterima PT JKP untuk pelantikan KPPS sebanyak 25.231 orang. Ada selisih yang sangat besar. Jumlah selisihnya sejumlah 1.032. "Ini sangat besar dan potensi kerugian kami," tegasnya. Pernyataan KPU Sleman telah memutuskan kontrak, dinilai Ari sebagai tindakan yang terburu-buru. Kontrak mana yang dimaksud. Alasannya, sampai sekarang PT JKP belum pernah menandatangani kontrak formil apapun dengan KPU

Sleman. "Tidak ada klarifikasi secara baik-baik kepada kami terlebih dahulu. Ini menyebabkan kami menjadi objek serangan yang diarahkan kepada perusahaan maupun kami," sesal Ari sambil menerawang jauh. Ari menceritakan Sekretariat KPU Sleman melakukan pemesanan snack kepada pihaknya melalui program e-katalog. Melalui e-katalog, PT JKP telah menjelaskan isi dari setiap paket makanan ringan kering yang akan disediakan. Saat itu telah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Sleman. Selain itu, KPU Sleman menegaskan yang diutamakan adalah distribusi makanan yang harus terjamin. Tidak lambat dan tanpa ada

makanan yang basi. KPU Sleman baru melakukan klik pada Selasa 23 Januari 2024 pukul 15.11. PT JKP kemudian mengkonfirmasi pada pukul 18.46. Adapun PPK KPU Sleman baru menyelesaikan negosiasi pada Jumat 26 Januari 2024 pukul 13.24. Kemudian PPK menyetujui paket pada Jumat 26 Januari 2024. Ini persis sehari usai pelaksanaan distribusi snack berlangsung. Namun tak berapa lama kemudian, Ketua KPU Sleman mengumumkan telah memutuskan kontrak. Padahal kontrak belum ada dan belum ditandatangani. "Terus terang kami tidak tahu apa sebenarnya isi dan bunyi kontrak yang diputus Ketua KPU Sleman tersebut," ungkap Ari. (*)-d

JELANG PEMUNGUTAN SUARA

Polda DIY Geser 933 Personel ke TPS

SLEMAN (KR) - Menjelang pemungutan suara, Polda DIY menggeser 933 pasukannya membantu Polres atau Polresta di DIY untuk mengamankan TPS. Dengan rincian, Polresta Sleman sebanyak 164 personel, Polres Bantul 150 personel, Polresta Yogyakarta sebanyak 184 personel dan Polres Gunungkidul sebanyak 371 personel

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan, jumlah TPS di DIY sebanyak 11.932 lokasi dengan rincian TPS rawan 59 lokasi, TPS kurang rawan 11.788 lokasi, TPS khusus 85 lokasi serta dengan jumlah pemilih 2.870.974 jiwa.

"Setiap pasukan dilengkapi perlengkapan perorangan dan buku saku, agar bisa melihat apa yang harus dikerjakan. Mereka bertugas di bawah kendali Kapolresta atau Kapolresta selama tiga hari, sejak 13-15 Februari," jelasnya, Senin



Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan saat mengecek pasukan.

(12/2). Kapolda mengatakan, pergeseran pasukan paling banyak ke Polres Gunungkidul, karena paling banyak TPS namun personel kurang. Dari sebanyak 59 TPS rawan, paling banyak berada di wilayah Bantul dan Sleman. Pengamanan untuk TPS rawan menurut jenderal bintang dua ini, berbeda dengan TPS lainnya. "Beda hanya di jumlah pengawasan. TPS rawan dengan pola pengamanan 224 ada juga 236. Dalam artian, 2 polisi 2 TPS de-

ngan 4 hingga 6 Linmas. Lebih pada pola pengamatannya," tandasnya. Sedangkan terkait pengamanan di TPS tempat salah satu cawapres yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Sleman, Kapolda mengatakan jika pengamanan dilakukan melekat. Hal itu sudah dilakukan sejak digelarnya Operasi Mantap Brata beberapa waktu lalu. "Jika sudah dinyatakan selesai, maka pengamanan melekat akan kita cabut," pungkas Kapolda. (Ayu)-d

Bupati Apresiasi Pembentukan PWI Sleman

SLEMAN (KR) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sleman melakukan audiensi ke Bupati Sleman Kustini di kantornya, Senin (12/2). Agenda ini dalam rangka persiapan menjelang dilan-

tkinya pengurus PWI Sleman pada 26 Februari mendatang. Perwakilan Pengurus PWI Sleman yang ikut audiensi di antaranya Ketua PWI Sleman terpilih Wisnu Wardhana, Wakil Ketua

Bidang Kerjasama dan Kesejahteraan Subardi, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Ikhwanudin, Wakil Ketua Bidang Keuangan Hasto Sutadi, Sekretaris 1 Adi Prabowo dan Sekretaris 2 Awan Tursono.

Sementara Bupati Kustini mengapresiasi dan menyambut baik terbentuknya kepengurusan PWI Kabupaten Sleman. Termasuk pula siap untuk bersinergi dan menjalin kerja sama.



Perwakilan pengurus PWI Sleman bersama Bupati Kustini.

"Dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan insan pers yang dapat memberitakan berbagai program yang telah disusun kepada masyarakat. Begitu pula prestasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah setempat. Tak hanya itu, keberadaan wartawan sangat mendukung perkembangan potensi-potensi yang dimiliki baik di bidang budaya, pariwisata maupun sektor lain," ujar Bupati. (Has)-d

"Saya akan mengubah mind set kepada masyarakat yang selama ini selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah. Dimana sekarang sudah saatnya tidak perlu memberikan ikan tapi cukup memberikan kail dan umpan untuk mendapatkan ikan. Artinya mereka diberikan keterampilan untuk bisa mandiri," kata Suryana, Senin (12/2).

PEMKAB SLEMAN GANDENG BANK BPD DIY Dorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten Sleman dengan Aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) Bank BPD DIY. Diharapkan integrasi Siskeudes dengan aplikasi Digdaya Bank BPD DIY ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada Bank BPD DIY yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Sleman untuk memajukan Kabupaten Sleman. "Ke depan tentunya saya harapkan seluruh kalurahan yang ada di Sleman menerapkan Digdaya Bank BPD DIY dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih transparan, cepat, aman dan dengan transaksi nontunai," ucapnya kemarin. Sementara Direktur Pe-

masaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto menyebut, perjanjian kerja sama ini merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan pengelolaan dana desa melalui layanan digital Bank BPD

DIY yang terkoneksi dengan Siskeudes. "Harapannya dengan integrasi sistem ini pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, cepat dan aman," jelasnya. (Has)-d



Wabup Danang Maharsa dan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY usai penandatanganan kerja sama.

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Fokus Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Rakyat

H Suryana AMdKes
Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar



Suryana (kanan) bersama peserta pelatihan kelompok budidaya ayam jawa super.

SLEMAN (KR) - Anggota DPRD Sleman H Suryana AMdKes akan terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat kecil. Salah satunya dengan memberikan pemberdayaan agar masyarakat memiliki keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. "Saya akan mengubah mind set kepada masyarakat yang selama ini selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah. Dimana sekarang sudah saatnya tidak perlu memberikan ikan tapi cukup memberikan kail dan umpan untuk mendapatkan ikan. Artinya mereka diberikan keterampilan untuk bisa mandiri," kata Suryana, Senin (12/2).

Suryana (kanan) bersama peserta pelatihan kelompok budidaya ayam jawa super.

dalam berbudidaya atau beternak. Kemudian bagi pelaku UMKM, supaya mereka tambah terampil dalam menjalankan usahanya," ujar Ketua Fraksi Golkar ini. Ketika masyarakat kecil sudah mendapatkan keterampilan, tentu akan membuka peluang usaha sendiri. Dengan harapan masyarakat kecil tidak perlu mengandalkan lagi bantuan pemerintah karena sudah mandiri secara ekonomi. "Kalau masyarakat itu secara ekonomi sudah tercukupi, kehidupan mereka akan terenteram dan harmonis. Ketika ekonomi tercukupi, secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sleman," ucap warga Pundong II Tirtoadi Mlati ini. Sementara dalam Pemilu 2024 ini, Suryana juga mengajak masyarakat untuk sukseskan agar pesta demokrasi lima tahun ini berjalan aman dan lancar. Masyarakat tidak boleh terpecah atau mudah diadu domba oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Mari gunakan hak pilih masing-masing untuk menentukan nasib bangsa dan negara dalam lima tahun mendatang. Beda pilihan boleh, tapi tidak boleh merusak rasa persaudaraan dan kerukunan di masyarakat," pesan anggota legislatif dari Dapil Mlati-Gamping ini. (Sni)-d